



LAPORAN KEUANGAN

TA. 2022

DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ALAMAT : JL. AW. SYAHRANI NO.16 SAMARINDA

Telp (0541) 743908 Fax. (0541) 743810

EMAIL : dinkeskaltim16@gmail.com

WEBSITE : www.kesehatan.kaltimprov.go.id

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
MASING – MASING SKPD	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
LAPORAN OPERASIONAL	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
NERACA	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xiii
BAB I	14
1.1. Maksud dan Tujuan	15
1.2. Landasan Hukum	15
1.3. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
2.1. Ekonomi Makro	19
2.2. Kebijakan Keuangan	19
2.3. Kebijakan Keuangan	47
2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja	48
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	75
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	110
BAB IV	111
4.1 Entitas Akuntansi	111
4.2 Basis Akuntansi	111
4.3 Basis Pengukuran	111
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	112
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi	112
4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan	112
4.4.2.1 Pendapatan – LRA	112
4.4.2.2 Belanja	112
4.4.2.3 Pendapatan - LO	113
4.4.2.4 Beban	114
4.4.2.5 Aset	115
4.4.2.6 Kewajiban	118
4.4.2.7 Ekuitas	118
BAB V	120
5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD	120
5.1.1. Pendapatan	120
5.1.1.1. Pendapatan pajak	121
5.1.1.2. Retribusi	121
5.1.1.2.1. Retribusi Jasa Usaha	121
5.1.1.2.1.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	122
Lain-lain PAD yang sah	122
5.1.2. Belanja	122
5.1.2.1 Belanja Operasi	123

5.1.2.2	Belanja Modal.....	126
5.1.3.	Pendapatan LO.....	126
5.1.3.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO.....	127
5.1.4.	Beban LO.....	127
5.1.4.1.	Beban Operasi.....	128
5.1.4.1.1.	Beban Pegawai.....	128
5.1.4.1.2.	Beban Persediaan.....	129
5.1.4.1.3.	Beban Jasa.....	129
5.1.4.1.4.	Beban Hibah.....	129
5.1.4.1.5.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	130
5.1.4.1.6.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	130
5.1.4.1.7.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	130
5.1.5.	Aset.....	130
5.1.5.1.	Aset Lancar.....	131
5.1.5.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan.....	131
5.1.5.1.2.	Piutang Lainnya.....	132
5.1.5.1.3.	Persediaan.....	132
5.1.5.2.	Aset Non lancar.....	132
5.1.5.2.1.	Aset Tetap.....	132
5.1.5.2.1.1.	Tanah.....	133
5.1.5.2.1.2.	Peralatan dan Mesin.....	133
5.1.5.2.1.3.	Gedung dan Bangunan.....	134
5.1.5.2.1.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	135
5.1.5.2.1.5.	Aset Tetap Lainnya.....	135
5.1.5.2.1.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	135
5.1.5.2.1.7.	Akumulasi Penyusutan.....	136
5.1.5.2.2.	Aset Lainnya.....	136
5.1.6.	Kewajiban.....	136
5.1.6.1.	Kewajiban Jangka Pendek.....	136
5.1.6.2.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....	136
5.1.6.3.	Pendapatan Diterima Dimuka.....	137
5.1.6.4.	Utang Beban.....	137
5.1.6.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	137
5.1.7.	Ekuitas.....	137
BAB VI.	138
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi.....	138
6.2	Tugas dan Fungsi.....	139
6.3	Sumber Daya Manusia.....	142
BAB VII.	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pergeseran Anggaran Pada Dinas Kesehatan	21
Tabel 2 Pergeseran Anggaran Pada UPTD Laboratorium Kesehatan.....	31
Tabel 3 Pergeseran Anggaran Pada UPTD RS Mata.....	33
Tabel 4 Pergeseran Anggaran Pada UPTD RS KORPRI	37
Tabel 5 Pergeseran Anggaran Pada UPTD Bapelkes.....	42
Tabel 6 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada Dinas Kesehatan	48
Tabel 7 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan.....	59
Tabel 8 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan.....	62
Tabel 9 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Rumah Sakit Mata.....	64
Tabel 10 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Rumah Sakit Korpri.....	68
Tabel 11 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022 dan 2021	120
Tabel 12 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2022 dan 2021	121
Tabel 13 Realisasi Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah	122
Tabel 14 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan 2021.....	123
Tabel 15 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021	124
Tabel 16 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021	124
Tabel 17 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa	125
Tabel 18 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021.....	126
Tabel 19 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021	127
Tabel 20 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	127
Tabel 21 Realisasi Beban LO Tahun 2022 dan 2021	128
Tabel 22 Perbandingan Aset Tahun 2022 dan 2021.....	131
Tabel 23 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2022 ...	133
Tabel 24 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Dinas Kesehatan.....	142
Tabel 25 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD Balai Pelatihan Kesehatan.....	143
Tabel 26 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD Laboratorium Kesehatan.....	143
Tabel 27 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD RS Mata.....	144
Tabel 28 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD RS Korpri.....	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2022
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2022 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2020
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2022 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2022
Lampiran VIII	Rekap tagihan Belanja tahun 2022 yang ditagih / dibayar tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IX	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 Desember 2022 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2022 dengan Validasi Bank
Lampiran X	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2022 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 Desember 2022 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2022 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XV	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2022 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVI	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2022
Lampiran XIX	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2022 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)
Lampiran XXI	Mapping Belanja Ta. 2022 (Format untuk SKPD akan disesuaikan)

**PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa UPTD yaitu UPTD Balai Pelatihan Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan yang memiliki dua

sumber dana yaitu APBD Murni dan BLUD, UPTD Rumah Sakit Mata yang memiliki dua sumber dana yaitu APBD Murni dan BLUD, dan UPTD Rumah Sakit KORPRI yang memiliki dua sumber dana yaitu APBD Murni dan BLUD.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD Tahun 2022 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2022 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimal meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD TA. 2021;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun Anggaran 2023 serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pendapatan LO

5.1.4. Beban LO

5.1.5. Aset

5.1.6. Kewajiban

5.1.7. Ekuitas

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya , dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0.23 persen. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2022. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya pergeseran APBD. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp.218.079.673,494,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp.187.138.924.585,00 pergeseran anggaran belanja sebesar 85,81% Pada Lingkup SKPD Dinas Kesehatan pergeseran anggaran ada pada Dinas Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan, RSUD RS Mata dan RSUD Korpri, dan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan. Melalui pergeseran anggaran ini diharapkan melalui keterbatasan anggaran yang ada, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap diberikan secara maksimum. Adapun pergeseran anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumber daya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp.168.468.000,00 sedangkan target yang ditentukan sebesar Rp.74.160.000 atau sebesar 227,17% Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi peningkatan sebesar Rp.132.868.000,00 atau sebesar 373,22% yang berasal dari pendapatan pada UPTD Lingkup Dinkes Prov Kaltim yaitu UPTD Bapelkes, Sedangkan pada Dinas Kesehatan Prov Kaltim tidak ada aktifitas yang menimbulkan pendapatan. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp.111.068.168.371,21 dari anggaran sebesar Rp.133.613.974.089,00 atau sebesar 84.34%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp.2.331.115.626,79 atau sebesar 25,13% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp.113.399.283.998,00. Adapun penjelasan atas penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

Tabel 1 Pergeseran Anggaran Pada Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.1.160.244.000,00			Rp.1.160.244.000,00
01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.908.244.000,00			Rp.908.244.000,00
01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.252.000.000,00			Rp.252.000.000,00
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.38.328.841.501,00	Rp.10.458.000.000,00		Rp.48.786.841.501,00
02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp..37.960.001.501,00	Rp.10.458.000.000,00		Rp.48.418.001.501,00

02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.318.840.000,00			Rp.318.840.000,00
02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.10.000.000,00			Rp.10.000.000,00
02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.10.000.000,00			Rp.10.000.000,00
02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.10.000.000,00			Rp.10.000.000,00
02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.20.000.000,00			Rp.20.000.000,00
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.486.213.000,00			Rp.486.213.000,00
05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.157.653.000,00			Rp.157.653.000,00

05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.328.560.000,00			Rp.328.560.000,00
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.2.221.993.300,00	Rp.173.806.000,00		Rp.2.395.799.300,00
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.40.814.800,00			Rp.40.814.800,00
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.725.428.000,00	Rp.173.806.000,00		Rp.899.234.000,00
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.53.766.500,00			Rp.53.766.500,00
06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.38.400.000,00			Rp.38.400.000,00
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.1.363.584.000,00			Rp.1.363.584.000,00
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.3.112.291.027,00	Rp.100.000.000,00		Rp.3.212.291.027,00

08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.18.743.000,00			Rp.18.743.000,00
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.706.163.939,00	Rp.100.000.000,00		Rp.806.163.939,00
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2.387.384.088,00			Rp.2.387.384.088,00
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.580.009.600,00			Rp.580.009.600,00
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.177.236.000,00			Rp.177.236.000,00
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.211.380.000,00			Rp.211.380.000,00
09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.191.393.600,00			Rp.191.393.600,00

15		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.4.793.589.000,00	Rp.246.194.000,00		Rp.5.039.783.000,00
15	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.96.754.000,00			Rp.96.754.000,00
15	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Rp.90.688.500,00			Rp.90.688.500,00
15	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.149.880.000,00		Rp.142.380.000,00	Rp.7.500.000,00

15	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.621.539.500,00	Rp.420.000.000,00		Rp.1.041.539.500,00
15	22	Pengadaan Obat,Vaksin,Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 3.834.727.000,00		Rp.31.426.000,00	Rp. 3.803.301.000,00
16		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.64.734.596.630,00		Rp.5.651.284.000,00	Rp.59.083.312.630,00
16	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp.222.987.760,00			Rp.222.987.760,00
16	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada	Rp.781.961.260,00			Rp.781.961.260,00

		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				
16	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp.785.500.000,00			Rp.785.500.000,00
16	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.6.506.017.000,00		Rp.5.743.784.000,00	Rp.762.233.000,00
16	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.251.169.000,00			Rp.251.169.000,00
16	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.236.787.000,00		Rp.57.500.000,00	Rp.179.287.000,00
16	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.150.000.000,00			Rp.150.000.000,00
16	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	Rp.382.611.000,00			Rp.382.611.000,00
16	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Rp.1.085.094.000,00			Rp.1.085.094.000,00

16	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp.120.319.000,00			Rp.120.319.000,00
16	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK	Rp.110.457.000,00			Rp.110.457.000,00
16	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Rp.104.828.000,00			Rp.104.828.000,00
16	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.52.481.598.010,00			Rp.52.481.598.010,00
16	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp.169.470.000,00			Rp.169.470.000,00
16	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp.527.395.400,00		Rp.100.000.000,00	Rp.427.395.400,00
16	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Rp.422.882.200,00			Rp.422.882.200,00
16	23	Penyediaan dan Pengelolaan	Rp.108.520.000,00			Rp.108.520.000,00

		Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
16	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.437.000.000,00			Rp.437.000.000,00
17		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp.375.960.000,00			Rp.375.960.000,00
17	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp.375.960.000,00			Rp.375.960.000,00
18		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.879.107.800,00			Rp.879.107.800,00
19	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.18.000.000,00			Rp.661.921.553,00
20	02	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.861.107.800,00			Rp.288.350.240,00

21		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp.126.640.200,00			Rp.126.640.200,00
21	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp.126.640.200,00			Rp.126.640.200,00
22		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Rp.6.780.300,00			Rp.6.780.300,00
24	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp.6.780.300,00			Rp.6.780.300,00
25		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 619.523.350,000		Rp.150.000.000,00	Rp.469.523.350,00
	01	Penyelenggaraan Promosi	Rp. 619.523.350,00		Rp. 150.000.000,00	Rp. 469.523.350,00

		Kesehatan dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat				
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2 Pergeseran Anggaran Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1887.350.985,00	Rp.25.426.500,00		Rp.1.912.777.485,00
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.388.574.153,00	Rp.25.426.500,00		Rp.414.000.653,00
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.498.776.832,00			Rp.1.498.776.832,00
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp.198.000.000,00	Rp.396.000.000,00		Rp.594.000.000,00

		Pemerintahan Daerah				
	09	Pemeliharaan /Rehab Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp.198.000.000,00	Rp.396.000.000,00		Rp.594.000.000,00
10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.6.000.000.000,00	Rp.11.260.618.695,00		Rp.17.260.618.695,00
	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.6.000.000.000,00	Rp.11.260.618.695,00		Rp.17.260.618.695,00
15		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.2.902.088.000,00	Rp.2.383.000.000,00		Rp.5.285.088.000,00
	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Rp.2.902.088.000,00	Rp.2.383.000.000,00		Rp.5.285.088.000,00

Tabel 3 Pergeseran Anggaran Pada UPTD RS Mata
Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.126.060.000,00	Rp.28.970.000,00		Rp.155.030.000,00
02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Rp.126.060.000,00	Rp.28.970.000,00		Rp.155.030.000,00
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.54.000.000,00	Rp.288.300.000,00		Rp.342.300.000,00
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.54.000.000,00	Rp.288.300.000,00		Rp.342.300.000,00
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.830.812.000,00	Rp.3.411.917.125,00		Rp.4.242.729.125,00

06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.17.616.000,00	Rp.184.813.000,00		Rp.202.429.000,00
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.312.852.000,00	Rp.2.473.669.425,00		Rp.2.786.521.42500
06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.22.321.000,00	Rp.109.852.800,00		Rp.132.173.800,00
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.82.035.000,00	Rp.59.597.900,00		Rp.141.632.900,00
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.395.988.000,00	Rp.583.984.000,00		Rp.979.972.000,00
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.395.120.000,00			Rp.395.120.000,00
07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.395.120.000,00			Rp.395.120.000,00
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.514.331.000,00	Rp.105.006.500,00		Rp.619.337.500,00

08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.514.331.000,00	Rp.105.006.500,00		Rp.619.337.500,00
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.108.055.000,00	Rp.2.091.134.375,00		Rp.2.199.189.375,00
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.77.455.000,00	Rp.40.812.000,00		Rp.118.267.000,00
09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.30.600.000,00	Rp.24.400.000,00		Rp.55.000.000,00
09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.2.026.422.375,00		Rp.2.026.422.375,00
15		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.4.786.826.397,00	Rp.91.172.000,00		Rp.4.877.998.397,00

15	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Rp.4.586.855.960,00	Rp.91.172.000,00		Rp.4.678.027.960,00
15	18	Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.199.970.437,00			Rp.199.970.437,00
16		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 3.926.958.680,00			Rp.3.926.958.680,00
16	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp. 3.926.958.680,00			Rp. 3.926.958.680,00

Tabel 4 Pergeseran Anggaran Pada UPTD RS KORPRI
Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.126.720.000,00			Rp.126.720.000,00
02	02	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.126.720.000,00			Rp.126.720.000,00
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.511.950.000,00	Rp.683.900.034,00		Rp.1.195.850.034,00
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.511.950.000,00	Rp.683.900.034,00		Rp.1.195.850.034,00
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.2.410.116.412,00	Rp.2.029.911.022,00		Rp.4.440.027.434,00

06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.31.276.580,00			Rp.31.276.580,00
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.317.101.132,00	Rp.738.425.300,00		Rp.2.055.526.432,00
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.128.207.000,00			Rp.128.207.000,00
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.164.307.700,00	Rp.19.397.722,00		Rp.183.705.422,00
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.769.224.000,00	Rp.1.272.088.000,00		Rp.2.041.312.000,00
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.3.975.175.000,00		Rp.3.612.574.000,00	Rp.362.601.000,00
07	05	Pengadaan Mebel	Rp.3.975.175.000,00		Rp.3.612.574.000,00	Rp.362.601.000,00
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.5.958.991.308,00	Rp.40.000.000,00		Rp.5.998.991.308,00

08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik enyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.650.833.276,00			Rp.650.833.276,00
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.5.308.158.032,00	Rp.40.000.000,00		Rp.5.348.158.032,00
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.267.174.800,00	Rp.35.839.000,00		Rp.303.013.800,00
09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp.30.750.200,00			Rp.30.750.200,00
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.126.290.800,00			Rp.126.290.800,00
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.110.133.800,00	Rp.35.839.000,00		Rp.145.972.800,00
10		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Rp.17.537.760.914,00	Rp.822.923.944,00		Rp.18.360.684.858,00

		Kesehatan Masyarakat				
	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.17.050.158.514,00	Rp.822.923.944,00		Rp.17.873.082.458,00
15	02	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp.2.306.790.645,00			Rp.2.306.790.645,00
15	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp.66.550.000,00			Rp.66.550.000,00
15	10	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.12.709.749.069,00	Rp.419.627.944,00		Rp.13.129.377.013,00
15	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Rp. 482.364.000,00	Rp.50.265.000,00		Rp. 532.629.000,00
15	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Rp.84.722.800,00			Rp.84.722.800,00

		Fasilitas Layanan Kesehatan				
15	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.249.984.000,00			Rp.249.984.000,00
16		Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.1.149.998.000,00	Rp.353.031.000,00		Rp.1.503.029.000,00
16	22	Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.1.149.998.000,00	Rp.353.031.000,00		Rp.1.503.029.000,00
17		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 272.202.400,00			Rp. 272.202.400,00
17	01	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp. 272.202.400,00			Rp. 272.202.400,00
17		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp.215.400.000,00			Rp.215.400.000,00
17	03	Pengadaan Alat/Perangkat	Rp.215.400.000,00			Rp.215.400.000,00

		Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				
19		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp.1.720.800.000,00			Rp.1.720.800.000,00
	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.1.720.800.000, 00			Rp.1.720.800.000, 00

Tabel 5 Pergeseran Anggaran Pada UPTD Bapelkes Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.104.400.000,00			Rp.104.400.000,00

02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Rp.104.400.000,00			Rp.104.400.000,00
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.111.300.000,00			Rp.111.300.000,00
05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.111.300.000,00			Rp.111.300.000,00
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.1.773.005.515,00	Rp.989.013.000,00		Rp.2.762.018.515,00
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.40.261.400,00			Rp.40.261.400,00
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.862.934.000,00	Rp.989.013.000,00		Rp.1.851.947.000,00
06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.314.159.000,00			Rp.314.159.000,00

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.55.807.615,00			Rp.55.807.615,00
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.43.983.500,00			Rp.43.983.500,00
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.455.860.000,00			Rp.455.860.000,00
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.541.990.000,00	Rp.1.236.771.000,00		Rp.1.778.761.000,00
07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.220.020.000,00			Rp.220.020.000,00
07	05	Pengadaan Mebel	Rp.321.970.000,00	Rp.1.236.771.000,00		Rp.1.558.741.000,00
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.1.658.838.266,00			Rp.1.658.838.266,00

08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.7.000.000,00			Rp.7.000.000,00
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.545.063.434,00			Rp.545.063.434,00
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.106.774.832,00			Rp.1.106.774.832,00
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.3.822.932.600,00	Rp.385.000.000,00		Rp.4.207.932.600,00
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan	Rp.93.432.600,00			Rp.93.432.600,00
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.65.750.000,00			Rp.65.750.000,00
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Rp.3.663.750.000,00	Rp.385.000.000,00		Rp.4.048.750.000,00

02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.462.378.000,00			Rp.462.378.000,00
02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.462.378.000,00			Rp.462.378.000,00

2.3. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp.168.468.000,00 sedangkan target yang ditentukan sebesar Rp.74.160.000 atau sebesar 227,17% Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi peningkatan sebesar Rp.132.868.000,00 atau sebesar 373,22% Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.1.160.244.000,00	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen
01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.908.244.000,00	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.252.000.000,00	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.48.786.841.501,00	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.48.418.001.501,00	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun
02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan	Rp.318.840.000,00	Terpenuhinya Pelaksanaan dan	1 Tahun

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.10.000.000,00	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.10.000.000,00	Terpenuhinya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen
02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.10.000.000,00	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Tahun
02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.20.000.000,00	Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.486.213.000,00	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.157.653.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145 Stel

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.328.560.000,00	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73 orang
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.2.395.799.300,00	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.40.814.800,00	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 unit
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.899.234.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 dokumen
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.53.766.500,00	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.38.400.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.1.363.584.000,00	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.3.212.291.027,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.18.743.000,00	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.806.163.939,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2.387.384.088,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.580.009.600,00	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.177.236.000,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.211.380.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.191.393.600,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan
15		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.5.039.783.000,00	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
15	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Rp. 96.754.000,00	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	85,60%
15	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Rp.90.688.500,00	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	92,32%
15	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat	Rp.7.500.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Alat	50 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
15	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.1.041.539.500,00	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Laporan
15	22	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.3.803.301.000,00	Terlaksananya Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Pengadaan
16		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.59.083.312.630,00	Tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
16	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp.222.987.760,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%
16	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Rp.781.961.260,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
16	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp.785.500.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100%
16	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp.360.604.500,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	3 Laporan
16	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.762.233.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen
16	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.251.169.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
16	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.179.287.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%
16	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.150.000.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
16	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Rp.382.611.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	10 Kab/Kota

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Mandiri dan Tradisional		Mandiri dan Tradisional	
16	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Rp.1.085.094.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	2 Kab/Kota
16	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp.120.319.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
16	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp.110.457.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5 Kab/Kota
16	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Rp.104.828.000,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	5 Kab/Kota
16	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Rp.116.030.011,00	Tercapainya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	10 Kab/Kota
16	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.52.481.598.010,00	Tercapainya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	90000 Jiwa
16	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp.169.470.000,00	Tercapainya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Kab/Kota

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
16	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp.427.395.400,00	Tercapainya Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	10 Kab/Kota
16	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Rp.422.882.200,00	Tercapainya Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	82 Pkm
16	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp.108.520.000,00	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Kab/Kota
16	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.437.000.000,00	Terlaksananya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75%
16	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp.100.000.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
17		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp.375.960.000,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
17	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp.375.960.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10 Kab/Kota
18		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp.18.000.000,00	Tercapainya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	50 Fasyankes
18	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.18.000.000,00	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Kab/Kota
20		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.861.107.800,00	Tercapainya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	75 Fasyankes
20	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.861.107.800,00	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Kab/Kota
21		Penerbitan Pengakuan Pedagang	Rp.126.640.200,00	Tercapainya Penerbitan Pengakuan	100%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
21	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp.126.640.200,00	Tercapainya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	27 PBF
23		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Teadisional (UKOT)	Rp.126.640.200,00	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Teadisional (UKOT)	
23	01	Pengendalian dan Pengawasan Sertya Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp.6.780.300,00	Tercapainya Pengendalian dan Pengawasan Sertya Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2 Kali
24		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Rp.469.523.350,00	Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	3 Kab/Kota

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
24	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp.469.523.350,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Saluran

Tabel 7 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.104.400.000,00	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.104.400.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 Stel
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.111.300.000,00	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp.40.261.400,00	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Kantor			
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.851.947.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.314.159.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.55.807.615,00	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.43.983.500,00	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.455.860.000,00	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.1.778.761.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.220.020.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
07	05	Pengadaan Mebel	Rp.1.558.741.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	12 Bulan
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.658.838.266,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.7.000.000,00	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.545.063.434,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.106.774.832,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp..4.207.932.600,00	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.93.432.600,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.65.750.000,00	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan	12 Bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Lainnya		Mesin Lainnya	
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.4.048.750.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan
20		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.462.378.000,00	Tercapainya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	12 Bulan
20	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.462.378.000,00	Tercapainya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Bulan

Tabel 8 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.912.777.485,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.414.000.653,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.498.776.832,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.954.000.000,00	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.594.000.000,00	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan
10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.17.260.618.695,00	Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.17.260.618.695,00	Terpenuhinya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan
01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Rp.5.285.088.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Daerah Provinsi			
	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Rp.5.285.088.000,00	Terpenuhinya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1 Tahun

Tabel 9 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Rumah Sakit Mata Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.155.030.000,00	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Rp.155.030.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.342.300.000,00	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp.342.300.000,00	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan	20 kali

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.4.242.729.125,00	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.202.429.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.2.786.521.425,00	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 item
06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.132.173.800,00	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 item
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.141.632.900,00	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 item
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.979.972.000,00	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.395.120.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.395.120.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.619.337.500,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.619.337.500,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.2.199.689.3750,00	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.118.267.000,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit
09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.55.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 Item
09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Rp.2.026.422.375,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya	
10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.6.898.221.680,00	Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Tahun
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.6.898.221.680,00	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Tahun
15		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.4.877.998.397,00	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
15	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Rp.4.678.027.960,00	Terselenggaranya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	5 Unit
15	18	Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.199.970.437,00	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Layanan Kesehatan	5 Item
16		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Rp.3.926.958.680,00	Tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Provinsi			
16	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp.3.926.958.680,00	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Bulan

Tabel 10 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Pada UPTD Rumah Sakit Korpri Tahun Anggaran 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.126.720.000,00	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.126.720.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.1.195.850.034,00	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.1.195.850.034,00	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 OK

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.4.440.027.434,00	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.31.276.580,00	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.2.055.526.432,00	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.128.207.000,00	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.183.705.422,00	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.2.41.312.000,00	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.362.601.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
07	05	Pengadaan Mebel	Rp.362.601.000,00	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	15 Unit
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.4.946.076.742,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.650.833.276,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.5.348.158.032,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.303.013.800,00	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit
09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.30.750.000,00	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp.125.290.800,00	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Operasional atau Lapangan			
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.145.972.800,00	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket
10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.3.172.982.034,00	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	
10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.3.172.982.034,00	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
15		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp.17.873.082.458,00	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
15	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp.2.306.790.645,00	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 Unit
15	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp.66.550.000,00	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
15	10	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.13.129.377.013,00	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10 Unit
15	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Rp. 532.629.000,00	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	12 Bulan
15	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.84.722.800,00	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	12 Bulan
15	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp.249.984.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	12 Bulan
15	22	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.1.503.029.000,00	Terlaksananya Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
16		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Rp.272.202.400,00	Tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		Provinsi			
16	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp.272.202.400,00	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	21 Unit
17		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp.215.400.000,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
17	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Rp.215.400.000,00	Terlaksananya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan	1 tahun
19		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp.1.720.800.000,00	Terpenuhinya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	80 Persen
	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.1.720.800.000,00	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	80 Persen

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat

Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2022 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 pada Dinas Kesehatan dan UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Dinas Kesehatan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk Tahun 2022 Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berbeda dengan tahun 2020 sehingga Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2022 dan 2021 tidak bisa dibandingkan. Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.1)

Dinas Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Menganggarkan sebesar Rp. 56.621.398.428,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Telah Terrealisasi Sebesar Rp. 38.955.606.555,17 atau 68,80 %.

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.1.01)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.160.244.000,00 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.015.905.416,00 atau 87,56%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (1.1.01.1)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp908.244.000,- dan terealisasi sebesar Rp833.221.516,00 atau 91,74%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.1.01.7)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp252.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp182.683.900,00 atau 72,49%. Meskipun masih

terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.1.02)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp.48.786.841.501,00 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp31.883.626.360,00 atau 65,35%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1.1.02.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.48.418.001.501,00 dan terealisasi sebesar Rp.31.520.244.625,00 atau 65,10%.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (1.1.02)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp318.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp318.840.000,00 atau 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1.1.02.5)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.054.700,00 atau 90,55%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (1.1.02.6)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.950.960,00 atau 89,51%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (1.1.02.7)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.821.650,00 atau 78,22%. Meskipun masih

terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1.1.02.8)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.714.425,00 atau 93,57%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.1.05)***

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp486.213.000,00 pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp424.629.204,00 atau 87,33%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (1.1.05.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp157.653.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.547.850,00 atau 99,93%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (1.1.05.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp328.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp267.081.354,00 atau 81,29%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.1.06)***

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp2.395.799.300,00 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar

Rp2.308.246.945,00 atau 96,35%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.1.06.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.814.800,00 dan terealisasi sebesar Rp37.228.875,00 atau 91,21%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.1.06.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp899.234.000,00 dan terealisasi sebesar Rp860.449.745,00 atau 95,69%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (1.1.06.5)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp53.766.500,00 dan terealisasi sebesar Rp50.879.775,00 atau 94,63%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (1.1.06.6)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp38.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.378.500,00 atau 55,67%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.1.06.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.363.584.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.338.310.050,00 atau 98,15%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.08)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp3.212.291.027,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.865.845.245,00 atau 89,21%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1.1.08.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp18.743.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.152.000,00 atau 80,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.1.08.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp806.163.939,00 dan terealisasi sebesar Rp583.875.107,00 atau 72,43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.1.08.4)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.387.384.088,00 dan terealisasi sebesar Rp2.266.818.138,00 atau 94,95%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.09)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp.580.009.600,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.457.353.385,17 atau 78,85%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.1.09.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp177.236.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.014.413,00 atau 62,07%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1.1.09.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp211.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp193.383.697,17 atau 91,49%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya (1.1.09.10)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp191.393.600,00 dan terealisasi sebesar Rp153.955.275,00 atau 80,44%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (2.1)

Dinas Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Menganggarkan sebesar Rp. 64.499.055.630,00 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 62.513.635.941,00 atau 96.92 %.

• ***Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (2.1.01)***

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp5.039.783.000,00 pada Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran

tersebut, terealisasi sebesar Rp4.530.990.001,00 atau 89,90%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022 dan selama masa pandemi covid 19 sebagian besar kegiatan masih dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting.

- ***Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (2.1.01.6)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp96.754.000,00 dan terealisasi sebesar Rp82.821.800,00 atau 85,60%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (2.1.01.7)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp90.688.500,00 dan terealisasi sebesar Rp83.721.200,00 atau 92,32%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (2.1.01.17)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 68,00%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (2.1.01.21)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.041.539.500,00 dan terealisasi sebesar Rp595.607.860,00 atau 57,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (2.1.01.22)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.803.301.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.763.739.141,00 atau 98,96%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (2.1.02)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp59.083.312.630,00 pada Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp57.704.645.670,00 atau 97,67%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (2.1.02.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp222.987.760,00 dan terealisasi sebesar Rp194.015.955,00 atau 87,01%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (2.1.02.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp781.961.260,00 dan terealisasi sebesar Rp440.443.320,00 atau 56,33%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (2.1.02.3)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp785.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp623.681.802,00 atau 79,40%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (2.1.02.6)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp762.233.000,00 dan terealisasi sebesar Rp595.357.628,00 atau 78,11%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (2.1.02.7)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp251.169.000,00 dan terealisasi sebesar Rp215.025.700,00 atau 85,61%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (2.1.02.8)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp179.287.000,00 dan terealisasi sebesar Rp144.247.100,00 atau 80,46%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (2.1.02.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.981.380,00 atau 49,32%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (2.1.02.10)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp382.611.000,00 dan terealisasi sebesar Rp353.746.700,00 atau 92,46%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (2.1.02.11)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.085.094.000,00 dan terealisasi sebesar Rp846.516.577,00 atau 78,01%. Meskipun

masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (2.1.02.12)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp120.319.000,00 dan terealisasi sebesar Rp116.274.980,00 atau 96,64%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (2.1.02.13)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp110.457.000,00 dan terealisasi sebesar Rp104.784.975,00 atau 94,86%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA (2.1.02.14)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp104.828.000,00 dan terealisasi sebesar Rp97.732.100,00 atau 93,23%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (2.1.02.16)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp52.481.598.010,00 dan terealisasi sebesar Rp52.427.085.300,00 atau 99,90%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (2.1.02.17)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp169.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp128.869.045,00 atau 76,04%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (2.1.02.19)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp427.395.400,00 dan terealisasi sebesar Rp425.752.000,00 atau 99,62%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (2.1.02.20)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp422.882.200,00 dan terealisasi sebesar Rp411.893.650,00 atau 97,40%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (2.1.02.23)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp108.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.210.600,00 atau 56,40%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (2.1.02.27)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp437.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp350.889.55800,00 atau 80,30%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (2.1.02.30)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.137.300,00 atau 93,14%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (2.1.03)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp375.960.000,00 pada Program Standarisasi

Pelayanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kesehatan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp278.000.270,00 atau 73,94%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (2.1.03.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp375.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp278.000.270,00 atau 73,94%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (3.1)

Dinas Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Menganggarkan sebesar Rp879.107.800,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Telah Terealisasi Sebesar Rp780.320.306,00 atau 88,76%.

• **Program Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (3.1.01)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp18.000.000,00 pada Program Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp15.320.000,00 atau 85,11%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (3.1.01.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.320.000,00 atau 85,11%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (3.1.02)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp861.107.800,00 pada Program Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp765.000.306,00 atau 88,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (3.1.02.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp861.107.800,00 dan terealisasi sebesar Rp765.000.306,00 atau 88,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (4.1)

Dinas Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Menganggarkan sebesar Rp133.420.500,00 pada Program Sedia Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Telah Terealisasi Sebesar Rp110.580.250,00 atau 82.88%.

• ***Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (4.1.01)***

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp126.640.200,00 pada Program Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp105.296.625,00 atau 83,15%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM, sementara SDM yang ada lebih fokus untuk menangani penanggulangan Covid 19 pada distribusi vaksin dan alkes ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

- ***Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (4.1.01.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp126.640.200,00 dan terealisasi sebesar Rp105.296.625,00 atau 83,15%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (4.1.02)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalokasikan sebesar Rp6.780.300,00 pada Program Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp5.283.625,00 atau 77,93%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (4.1.02.1)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.780.300,00 dan terealisasi sebesar Rp5.283.625,00 atau 77,93%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (5.1)

Dinas Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Mengalokasikan sebesar Rp469.523.350,00 pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Telah Terealisasi Sebesar Rp388.527.545,00 atau 82,75%.

- **Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi (5.1.02)**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalokasikan sebesar Rp469.523.350,00 pada Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp388.527.545,00 atau 82,75%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (5.1.02.1)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp469.523.350,00 dan terealisasi sebesar Rp388.527.545,00 atau 82,75%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3.1.2. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (1.1)

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Menganggarkan sebesar Rp10.623.250.381,00 pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Telah Terealisasi Sebesar Rp8.201.932.323,00 atau 77,21%.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.1.02)**

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp104.400.000,00 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.48.120.000,00 atau 46.09%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1.1.02.2)**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp104.400.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.48.120.000,00 atau 46.09%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.1.05)**

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp111.300.000,00 pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp110.847.000,00 atau 99,59%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (1.1.05.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp111.300.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp110.847.000,00 atau 99,59%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.1.06)***

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp2.762.018.515,00 pada Program Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.522.833.853,00 atau 91,34%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.1.06.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.261.400,00 dan terealisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 99,35%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.1.06.02)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.851.947.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.634.999.900,00 atau 88,29%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1.1.06.03)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp314.159.000,00 dan terealisasi sebesar Rp294.718.000,00 atau 93,81%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1.1.06.04)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp55.807.615,00 dan terealisasi sebesar Rp55.761.800,00 atau 99,92%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (1.1.06.05)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp43.983.500,00 dan terealisasi sebesar Rp42.003.500,00 atau 95,50%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.1.06.09)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp455.860.000,00 dan terealisasi sebesar Rp455.350.653,00 atau 99,89%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.1.07)***

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.778.761.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp735.417.000,00 atau 41,34%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1.1.07.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp220.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp170.000.000,00 atau 77,27%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.1.07.5)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.558.741.000,00 dan terealisasi sebesar Rp565.417.000,00 atau 36,27%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.08)**

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.658.838.266,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.507.139.360,00 atau 90,86%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1.1.08.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.000.000,00 atau 100,00%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.108.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp545.063.434,00 dan terealisasi sebesar Rp401.549.420,00 atau 73,67%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.1.08.4)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.106.774.832,00 dan terealisasi sebesar Rp1.098.589.940,00 atau 99,26%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.09)**

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp10.623.250.381,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp8.201.932.323,04

atau 77,21%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.1.09.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp93.432.600,00 dan terealisasi sebesar Rp83.709.015,00 atau 89,59%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.1.09.6)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp65.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.310.903,00 atau 99,33%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1.1.09.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.048.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.074.995.192,04,00 atau 75,95%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (3.1)

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Menganggarkan sebesar Rp. 462.378.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Telah Terealisasi Sebesar Rp.316.673.249,00 atau 68.49%

• **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (3.1.02)**

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp462.378.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp316.673.249,00 atau 68,49%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai,

hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (3.1.02.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp462.378.000,00 dan terealisasi sebesar Rp316.673.249,00 atau 68,49%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3.1.3. UPTD Laboratorium Kesehatan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 pada UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (1.1)

UPTD laboratorium Kesehatan Prov Kaltim TA 2022 Menganggarkan sebesar Rp.19.767.396.180,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 2.472.203.065,00 atau 12.51%

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.08)***

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.912.777.485,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.878.803.065,00 atau 98,22%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.1.08.02)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp414.000.653,00 dan terealisasi sebesar Rp397.576.233,00 atau 96,03%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.1.08.04)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.498.776.832,00 dan terealisasi sebesar Rp1.481.226.832,00 atau 98,83%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.09)**

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp594.000.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp593.400.000,00 atau 99,90%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1.1.09.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp594.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp593.400.000,00 atau 99,90%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (1.1.10)**

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 mrnganggarkan sebesar Rp. 17.260.618.695,00 pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Atas anggaran tersebut Terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% karena Fungsinya hanya untuk membekup pelayanan medis yang ada di UPTD Laboratorium dengan demikian apabila dana tidak digunakan atau belum terpakai akan menjadi SILPA di tahun berikutnya.

2. Program Pemenuhan UKP dan UKM (2.1)

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 mrnganggarkan sebesar Rp. 5.285.088.000,00 pada Program Pemenuhan UKP dan UKM. Atas anggaran tersebut Terealisasi sebesar Rp.4.700.842.586,00 atau sebesar 88,95%.

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi (2.1.01)**

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp5.285.088.000,00 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp4.700.842.586,00 atau 88,95%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Perawatan Labkes (2.1.01.15)**

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp5.285.088.000,00 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp4.700.842.586,00 atau 88,95%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3.1.4. UPTD Rumah Sakit Mata

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 pada UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (1.1)

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp 14.852.427.680,00 pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi atas anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.7.266.964.717,00 atau 48,93%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.1.02)**

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp155.030.000,00 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan belum terealisasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp130.110.000,00 atau 83,93%. Meskipun

masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN (1.1.02.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp155.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.110.000,00 atau 83,93%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.1.05)**

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp342.300.000,00 pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp332.157.117,00 atau 97,04%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (1.1.05.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp342.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp332.157.117,00 atau 97,04%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.1.06)**

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp4.242.729.125,00 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp4.113.834.226,00 atau 96,96%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.1.06.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp202.429.000,00 dan terealisasi sebesar Rp201.238.825,00 atau 99,41%. Meskipun masih

terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.1.06.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.786.521.425,00 dan terealisasi sebesar Rp2.718.334.179,00 atau 97,55%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1.1.06.3)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp132.173.800,00 dan terealisasi sebesar Rp82.502.150,00 atau 62,42%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1.1.06.4)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp141.632.900,00 dan terealisasi sebesar Rp141.614.816,00 atau 99,99%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.1.06.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp979.972.000,00 dan terealisasi sebesar Rp970.144.256,00 atau 99,00%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.1.07)***

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp395.120.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp355.891.600,00 atau 90,07%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.1.07.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp395.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp355.891.600,00 atau 90,07%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.08)***

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp619.337.500,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp491.981.010,00 atau 79,44%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.02)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp619.337.500,00 dan terealisasi sebesar Rp491.981.010,00 atau 79,44%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.09)***

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp2.199.689.375,00 pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.842.990.764,00 atau 83,78%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.1.09.2)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp118.267.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.342.630,00 atau 84,00%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (1.1.09.7)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.465.434,00 atau 42,66%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (1.1.09.10)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.026.422.375,00 dan terealisasi sebesar Rp1.720.182.700,00 atau 84,89%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (1.1.10)**

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp. 6.898.221.680,00 dan Realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% karena Fungsinya hanya untuk membekup pelayanan medis yang ada di UPTD Laboratorium dengan demikian apabila dana tidak digunakan atau belum terpakai akan menjadi SILPA di tahun berikutnya.

- **Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (1.1.10.1)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6.898.221.680,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%. karena Fungsinya hanya untuk membekup pelayanan medis yang ada di UPTD Laboratorium dengan demikian apabila dana tidak digunakan atau belum terpakai akan menjadi SILPA di tahun berikutnya.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (2.1)

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp.8.804.957.077,00 pada Kegiatan Pemenuhan

Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.8.269.630.723,00 atau 93.92%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (2.1.01)**

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp4.877.998.397,00 pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp4.496.678.649,00 atau 92,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (2.1.01.15)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp4.678.027.960,00 dan terealisasi sebesar Rp4.305.678.649,00 atau 92,04%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Layanan Kesehatan (2.1.01.18)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp199.970.437,00 dan terealisasi sebesar Rp191.000.000,00 atau 95,51%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (2.1.02)**

UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp3.926.958.680,00 pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar

Rp3.772.952.074,00 atau 96,08%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit (2.1.02.22)**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.926.958.680,00 dan terealisasi sebesar Rp3.772.952.074,00 atau 96,08%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3.1.5. UPTD Rumah Sakit Korpri

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 pada UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (1.1)

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp15.600.185.610,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp9.986.115.983,00 atau 64,01%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.1.02)**

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp126.720.000,00 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp125.200.000,00 atau 98,80%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1.1.02.2)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp126.720.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp125.200.000,00 atau 98,80%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.1.05)**

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.195.850.034,00 pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp731.684.485,00 atau 61,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (1.1.05.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.195.850.034,00 dan terealisasi sebesar Rp731.684.485,00 atau 61,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.1.06)**

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp4.440.027.434,00 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.314.701.723,00 atau 74,65%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1.1.06.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp31.276.580,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp31.200.000, 99,76%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.1.06.2)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.055.526.432,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.851.934.115,00 atau 90,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1.1.06.4)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp128.207.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp54.234.840,00 atau 42,30%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (1.1.06.5)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp183.705.422,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp133.817.300,00 atau 72,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1.1.06.9)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.041.312.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.243.515.468,00 atau 60,92%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.1.07)***

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp362.601.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp352.389.670,00 atau 97,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (1.1.07.5)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp362.601.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp352.389.670,00 atau 97,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.08)***

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp5.998.991.308,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp5.205.113.465,00 atau 86,77% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1.1.08.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp650.833.276,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp437.505.348,00 atau 67,22%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (08.04)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.348.158.032,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp4.767.608.117,00 atau 89,14%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

• ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.1.09)***

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp303.013.800,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp257.026.640,00 atau 84,82%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1.1.09.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp30.750.200,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp28.514.000,00 atau 92,73%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1.1.09.2)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp126.290.800,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp102.804.330,00 atau 81,40%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1.1.09.6)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp145.972.800,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp125.708.310,00 atau 86,12%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Program Pemenuhan UKP dan UKM (2.1)

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp18.360.684.858,00 pada Program Pemenuhan UKP dan UKM. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp13.007.406.873,00 atau 70,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (2.1.01)***

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp17.873.082.458,00 pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp12.651.786.373,00 atau 70,79%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (2.1.01.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.306.790.645,00 dan belum terealisasi.

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (2.1.01.9)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp66.550.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp62.914.800,00 atau 94,54%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (2.1.01.10)**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp13.129.377.013,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp11.527.637.994,00 atau 87,80%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (2.1.01.14)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp532.629.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp298.653.147,00 atau 56,07%. Masih terdapat sisa anggaran, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (2.1.01.17)**

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp84.722.800,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp72.950.715,00 atau 86,11%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan ((2.1.01.18)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp249.984.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp66.978.618,00 atau 26,79%. Masih terdapat sisa anggaran dari telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (2.1.01.22)**

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.503.029.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp622.651.099,00 atau 41,43%. Masih terdapat sisa anggaran dari yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (2.1.02)**

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp272.202.400,00 pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp155.928.500,00 atau 57,28%. Masih terdapat sisa anggaran tersebut dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit (2.1.02.22)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp272.202.400,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp155.928.500,00 atau 57,28%. Masih terdapat sisa anggaran tersebut dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (2.1.03)**

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp215.400.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp199.692.000,00 atau 92,71%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (2.1.03.3)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp215.400.000,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp199.692.000,00 atau 92,71%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan (3.1)

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.720.800.000,00 pada Program Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.425.600.000,00 atau 82,85%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (3.1.01)**

UPTD Rumah Sakit Korpri Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp1.720.800.000,00 pada Program Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.425.600.000,00 atau 82,85%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (3.1.01.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.720.800.000,00 Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.425.600.000,00 atau 82,85%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3.1.6. UPTD Rumah Sakit Korpri (BLUD)

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 pada UPTD Rumah Sakit Korpri (BLUD) Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (1.1.10)**

UPTD Rumah Sakit Korpri (BLUD) Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.172.982.034,00 pada Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD. Atas anggaran tersebut, belum ada realisasi pada tahun 2022. Sedangkan realisasi tahun 2021 juga tidak ada.

- ***Sub Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (1.1.10.1)***

Pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.172.982.034,00 dan belum ada realisasi. Sedangkan realisasi tahun 2021 juga tidak ada

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

1. Adanya Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran karena kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan dalam skala besar tidak bisa dilaksanakan dan kegiatan yang bersifat perjalanan dinas hanya dilaksanakan jika bersifat penting dan mendesak.
2. Efisiensi biaya-biaya untuk pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.
3. Pada Dinas Kesehatan adanya penambahan anggaran (ABT) pada belanja pegawai untuk tenaga PPPK bidang kesehatan sebesar Rp10.731.806.000,00.
4. Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan, belanja sumber daya air, telepon dan listrik tiap tahunnya tidak pasti tergantung pada padat tidaknya kegiatan pelatihan maupun pertemuan yang diselenggarakan.
5. Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan belanja Diklat Formal tidak sesuai pada target peserta sehingga sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran yang tersedia.
6. Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan pengadaan belanja modal (kasur/spring bed) tidak bisa terealisasi sepenuhnya.
7. Pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan belanja modal bangunan gudang kantor realisasi fisik 100%, namun realisasi pembayaran belum terealisasi dan akan dilakukan dianggarkan perubahan tahun 2023.

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2019. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- **Defenisi**
Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.
- **Pengakuan**
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.
- **Pengukuran**
Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- **Defenisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Defenisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai

sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- Defenisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya

- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp20.000.000 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka
Panjar Kegiatan
Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaan Bahan/Material
Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Goodwill
Lisensi dan frenchise
Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- Defenisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**

- **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya

- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- Defenisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah

atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2022.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 74.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 168.468.000,00 atau sebesar 227,17%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan dua rincian obyek pendapatan, yaitu pendapatan Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	
PENDAPATAN - LRA	74.160.000,00	168.468.000,00	227,17	35.600.000,00	78,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	74.160.000,00	168.468.000,00	227,17	35.600.000,00	78,87
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	74.160.000,00	168.468.000,00	227,17	35.600.000,00	78,87
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	00,00	0,00	00,00	

Pendapatan secara total melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh pendapatan melampaui target. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut

5.1.1.1. Pendapatan pajak

Dinas Kesehatan tidak memiliki pendapatan pajak daerah untuk tahun 2022 maupun 2021.

5.1.1.2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dari target sebesar Rp. 74.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 168.468.000,- atau 227,17%, Sedangkan perolehan tahun 2021 sebesar Rp. 35.600.000,- Bila dibandingkan dengan tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 132.868.000,- atau diatas 78,87%. Penyebab tercapai/tidak tercapainya target serta kenaikan/ penurunan antara tahun 2022 dan tahun 2021 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kategori pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	
Retribusi Jasa Usaha	74.160.000,00	168.468.000,00	227,17	35.600.000,00	6=((3-5)/5) 78.87

5.1.1.2.1. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari dua obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada masyarakat atas layanan berupa penyewaan kamar, penyewaan ruang pertemuan, kegiatan pelatihan dan penyewaan rumah. Pendapatan tersebut diperoleh dari UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan. Pada Tahun 2022 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target sebesar 74.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 168.468.000,- atau 227,17%, Bila Pendapatan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terdapat kenaikan sebesar sebesar Rp. 132.868.000,- atau diatas 78,87%.

Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah. Penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	00,00	

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 133.688.134.089,00 terealisasi sebesar Rp. 111.236.636.371,21 atau sebesar 83,21%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan

tiga jenis belanja, yaitu belanja operasional, dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	133.688.134.089,00	111.236.636.371,21	83,21	113.434.883.998,00	
<i>Belanja Operasi</i>	126.556.472.689,00	106.274.008.558,17	83,97	111.580.818.498,00	
Belanja Pegawai	48.879.179.881,00	31.918.284.827,00	65,30	32.961.692.883,00	
Belanja Barang dan Jasa	77.427.292.808,00	74.105.723.731,17	95,71	77.919.125.615,00	
Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	700.000.000,00	
<i>Belanja Modal</i>	7.131.661.400,00	4.962.627.813,04	69,59	1.854.065.500,00	
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.429.309.000,00	3.168.398.245,00	71,53	1.854.065.500,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.702.352.400,00	1.794.229.568,04	66,40	0,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	192.427.900,00	

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 94,67%. Dari target sebesar Rp. 126.556.472.689,00 terealisasi sebesar Rp. 106.274.008.558,17 atau 83,97%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Operasi	126.556.472.689,00	106.274.008.558,17	83,97	111.580.818.498,00	
Belanja Pegawai	48.879.179.881,00	31.918.284.827,00	65,30	32.961.692.883,00	
Belanja Barang dan Jasa	77.427.292.808,00	74.105.723.731,17	95,71	77.919.125.615,00	
Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	700.000.000,00	

▪ Belanja Pegawai

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 48.879.179.881,- untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp. 31.918.284.827,00,- atau sebesar 65,30%.

Tabel 16 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	48.879.179.881,00	31.918.284.827,00	65,30	32.574.231.583,00	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	26.780.839.881,00	12.899.002.625,00	48,16	13.850.433.583,00	
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	21.638.400.000,00	18.590.602.202,00	85,91	18.723.798.000,00	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	

Tersisnya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 16.960.895.054,00,- atau sebesar 34,70% disebabkan oleh

- Adanya pegawai yang pensiun

- Adanya Jabatan yang kosong menyebabkan Tunjangan Jabatan tidak terserap
- Banyaknya pegawai yang tugas luar menyebabkan Uang makan tidak terserap semua
- ABT pada Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. 10.458.000.000,00,- yang tidak terealisasi dikarenakan belum adanya formasi
- Belanja Barang dan Jasa
 Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	77.427.292.808,00	74.105.723.731,17	95,71	77.919.125.615,00	-4,89
Belanja Bahan Pakai Habis	6.988.853.715,00	6.480.490.078,00	97,88	12.096.773.630,00	
Belanja Bahan/Material	0	0		0	
Belanja Jasa Kantor	6.525.047.373,00	5.187.189.547,00	79,50	16.927.964.317,00	
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.757.145.720,00	52.696.671.162,00	99,89		
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	390.750.000,00	356.140.472,00	91,14	673.018.623,00	
Belanja Pemeliharaan Tanah	149.500.000,00	149.247.000,00	99,83	0	
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Irigasi	68.890.000,00	38.108.000,00	55,32		
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	516.212.000,00	398.461.950,00	77,19	0	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.128.280.000,00	1.107.491.321,17	98,16		
Belanja Perjalanan Dinas	8.800.614.000,00	7.610.324.201,00	86,47	8.550.092.555,00	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	102.000.000,00	81.600.000,00	80,00		
Belanja Sewa Rumah/Gedung /Parkir	0,00	0,00		50.000.000,00	
Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	100	700.000.000,00	

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.321.569.076,17 atau sebesar 4.29% disebabkan oleh Efisiensi biaya–biaya untuk pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 7.131.661.400,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.962.627.813,04,- atau sebesar 69,59%.

Tabel 18 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	(%)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	7.131.661.400,00	4.962.627.813,04	69,59	1.854.065.500,00	
Belanja Modal Tanah	-	-	-	0,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.429.309.000,00	3.168.398.245,00	71,53	1.854.065.500,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.702.352.400,00	1.794.229.568	66,40	0,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp. 2.169.033.586,96 atau sebesar 30,41% disebabkan antara lain sebagai berikut :

- Pengadaan Belanja Modal (Kasur/Spring Bed) tidak bisa realisasi sepenuhnya pada UPTD Bapelkes.
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor realisasi fisik 100%, namun realisasi pembayaran belum terealisasi dan akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 pada UPTD Bapelkes.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 168.468.000,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2021 sebesar Rp. 35.600.000,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp. 132.868.000,00 atau sebesar 373,22%. Perbandingan realisasi

masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 31 Des 2022	Realisasi 31 Des 2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN – LO	168.468.000,00	35.600.000,00	373,22
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</u>	168.468.000,00	35.600.000,00	373,22
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	168.468.000,00	35.600.000,00	373,22
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO</u>	-	-	
<u>Pendapatan Hibah - LO</u>	-	-	

5.1.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp. 168.468.000,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 35.600.000,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 132.868.000,00 atau sebesar 373,22%. Rincian pendapatan asli daerah – LO tahun 2022 kompilasi dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	168.468.000,00	35.600.000,00	373,22
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2022 sebesar Rp.102.976.620.600,02 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp.161.143.785.616,59 maka dapat diketahui terdapat penurunan

sebesar Rp.58.167.165.016,57 Atau -36,10%. Rincian Beban LO tahun 2022 kompilasi dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Beban LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	161.143.785.616,59	102.976.620.600,02	-36,10
Beban Operasional	161.143.785.616,59	102.976.620.600,02	-36,10
- Beban Pegawai	32.961.692.883,00	31.918.284.827,00	-3,17
- Beban Persediaan	48.412.641.693,59	3.133.698.629,85	-93,53
- Beban Jasa	62.221.138.630,00	58.371.004.671,00	-6,19
- Beban Pemeliharaan	1.001.316.183,00	1.693.308.271,17	-69,11
- Beban Perjalanan Dinas	7.957.341.907	7.610.324.201,00	-4,36
- Beban Hibah	700.000.000,00	250.000.000,00	-64,29
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.889.654.320,00	0	-100

5.1.4.1. Beban Operasi

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menanggung beban operasi sebesar Rp. 102.976.620.600,02

Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 161.143.785.616,59 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 58.167.165.016,57 Atau -36,10%. Rincian Beban Operasi tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Beban Pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp. 31.918.284.827,00 sedangkan pada tahun 2021 Rp. 32.961.692.883,00,-. Bila Beban Pegawai tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.043.408.056,00 atau sebesar -3,17%, hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya pegawai yang pensiun
- Adanya Jabatan yang kosong menyebabkan Tunjangan Jabatan tidak terserap
- Banyaknya pegawai yang tugas luar menyebabkan Uang makan tidak terserap semua.
- ABT pada Gaji Pokok PPPK akan tetapi tidak terealisasi karena tidak ada formasi penempatan PPPK pada Dinas Kesehatan Prov. Kaltim. Beserta UPTD.

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang dan jasa untuk menunjang operasional pelayanan. Beban Persediaan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.133.698.629,85 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 48.412.641.693,59. Bila Beban Persediaan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 45.278.943.063,74 atau sebesar -93,53%, Hal ini disebabkan karena pengadaan persediaan tahun 2022 baik pada Dinas Kesehatan maupun UPTD lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2021.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang dan jasa untuk menunjang operasional pelayanan. Beban Jasa pada tahun 2022 sebesar Rp. 58.371.004.671,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 62.221.138.630,00. Bila Beban Jasa tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 3.850.133.959,00 atau sebesar -6,19%, Hal ini disebabkan karena pengadaan Jasa tahun 2022 baik pada Dinas Kesehatan maupun UPTD lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2021.

5.1.4.1.4. Beban Hibah

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp. 250.000.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 700.000.000,00. Bila beban jasa tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 450.000.000,00 atau sebesar

-64,29%, hal ini terkait persetujuan pemberian hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.4.1.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 0,00,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 7.889.654.320,00. Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 7.889.654.320,00 atau sebesar -100%, hal ini disebabkan antara lain:

- Sampai dengan Laporan ini disusun, nilai beban penyusutan untuk aset belum selesai diperhitungkan
- Nilai yang tertera adalah nilai Beban amortisasi untuk Aset tidak berwujud.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penyusutan gedung dan bangunan. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp. 0,00,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 1.223.248.403,00. Bila Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 1.223.248.403,00 atau sebesar -100%.

5.1.4.1.7. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai penyusutan jalan, jaringan dan irigasi. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 sebesar Rp. 0,00,- sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 54.090.440,00,-. Bila Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 54.090.440,00 atau sebesar -100%.

5.1.5. Aset

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp.112.895.662.044,42 pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp. 74.655.887.383,23 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 38.239.774.661.19 atau 33,87%. Rincian perbandingan

aset tahun 2022 beserta kompilasi dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 22 Perbandingan Aset Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	112.895.662.044,42	74.655.887.383,23	51,22
Aset Lancar	4.604.761.361,70	1.257.969.913,55	266,05
- Kas dan Setara Kas	-	-	-
- Piutang Lainnya	-	-	-
- Persediaan	4.604.761.361,70	1.257.969.913,55	266,05
Aset Non lancar	108.290.900.682,72	73.397.917.469,68	32,22
- Aset Tetap	106.792.796.063,72	71.899.812.850,68	
- Aset Lainnya	1.498.104.619,00	1.498.104.619,00	

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp. 4.604.761.361,70. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.257.969.913,55 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.346.791.448,15 atau 72,68%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2022 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja.

Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2021 yang lalu.

5.1.5.1.2. Piutang Lainnya

Piutang pendapatan merupakan tunggakan pungutan pendapatan yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang pendapatan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00.

5.1.5.1.3. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.604.761.361,70 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.257.969.913,55 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.346.791.448.15 Atau 72,68%. Hal ini dikarenakan pengadaan persediaan pada tahun 2022 baik di Dinas Kesehatan maupun UPTD lebih besar jika dibandingkan tahun 2021.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp. 108.290.900.682.72 Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 73.397.917.469.68 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 34.892.983.213.04,- Atau 32,22%. Perubahan nilai aset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp. 106.792.796.063,72. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 71.899.812.850,68 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 34.892.983.213,04,- Atau 32,22%. Nilai aset tetap ini

telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 23 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2022

Uraian	2021	Bertambah	Berkurang	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	71.899.812.850,68	34.892.983.213,04	-	106.792.796.063,72	32,22
Tanah	17.804.146.337,28	29.869.114.000,00	-	47.673.260.337,28	62,65
Peralatan dan Mesin	44.965.490.248,00	3.229.639.645,00	-	48.195.129.893,05	6,70
Gedung dan Bangunan	34.371.679.884,35	853.201.455,06	-	35.224.881.339,41	2,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.871.679.000,00	-	-	1.871.679.000,00	0
Aset Tetap Lainnya	84.040.900,00	-	-	84.040.900,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	941.028.112,98	-	941.028.112,98	100
Akumulasi Penyusutan	-27.197.223.519,00	-	-	-27.197.223.519,00	0

5.1.5.2.1.1. Tanah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp. 47.673.260.337,28 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 17.804.146.337,28 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan Rp. 29.869.114.000,00

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp. 48.195.129.893,05 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. 44.965.490.248,05 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.229.639.645,00 Atau 7,18%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal : Rp3.229.639.645,00
 Hibah : Rp0
 Reklasifikasi dari : Rp0

Revaluasi : Rp

Pengurangan

Rusak Berat : Rp0

Dihapuskan : Rp0

Reklasifikasi dari : Rp0

Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp0

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp.35.224.881.339,41 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 34.371.679.884,35 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 853.201.455,06 Atau 2,42%. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal : Rp853.201.455,06,-

Hibah : Rp.0

Reklasifikasi dari : Rp.0

Revaluasi : Rp.0

Pengurangan

Rusak Berat : Rp.0

Dihapuskan : Rp.0

Reklasifikasi dari : Rp.0

Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp.0

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2020 tidak terdapat nilai gedung dan bangunan yang termasuk dalam ekstracountable.

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 1.871.679.000,00 Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.871.679.000,00,- maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Per 31 Desember 2022 tidak terdapat nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk dalam ekstracountable.

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 84.040.900,00 Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 84.040.900,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 941.028.112,98,00. Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 941.028.112,98,00. Perubahan nilai konstruksi dalam pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal	: Rp. 941.028.112,98,00,-
Hibah	: Rp.0
Reklasifikasi dari	: Rp.0
Revaluasi	: Rp.0

Pengurangan

Rusak Berat	: Rp.0
Dihapuskan	: Rp.0
Reklasifikasi dari	: Rp.0

Nilai dibawah Kapitalisasi : Rp.0

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 terdiri dari: Pembangunan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan.

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2022 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebesar -Rp.27.197.223.519,00. Bila dibandingkan dengan Akumulasi penyusutan tahun lalu yaitu sebesar -Rp.27.197.223.519,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan. Hal ini disebabkan karena sampai dengan laporan ini disusun nilai penyusutan untuk aset tetap belum selesai diperhitungkan.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp.1.498.104.619,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp.1.498.104.619,00 maka dapat diketahui tidak terdapat peningkatan/penurunan.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp. 74.263.009,00,- per 31 Desember 2022. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 24.859.419,00,- maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 49.403.590,00,- atau 66,51%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 74.263.009,00,-. Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp. 24.859.419,00,- maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp. 49.403.590,00,- atau 66,51%.

5.1.6.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Kewajiban yang berasal dari pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0. Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,-.

5.1.6.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2022 tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka.

5.1.6.4. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2022 terdapat Utang beban sebesar Rp. 0,-. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0,- maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.6.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2022 dan tidak termasuk ke dalam kategori utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, maupun utang beban. Pada akhir tahun 2022 tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya. Bila dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp.0,- maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/ penurunan.

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 112.821.399.035,42. Nilai ini secara matematis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. 74.631.027.964,23 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 38.239.774.661.19 atau 33,87%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl Abdul Wahab Syahrani No.16 Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD tersebut beralamat sebagai berikut:

➤ **UPTD Balai Pelatihan Kesehatan**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi pelatihan tenaga kesehatan beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Samarinda

➤ **UPTD Laboratorium Kesehatan**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi pemeriksaan dan pengujian hasil laboratorium kesehatan beralamat di Jl. K.H Akhmad Dahlan No.27 Samarinda

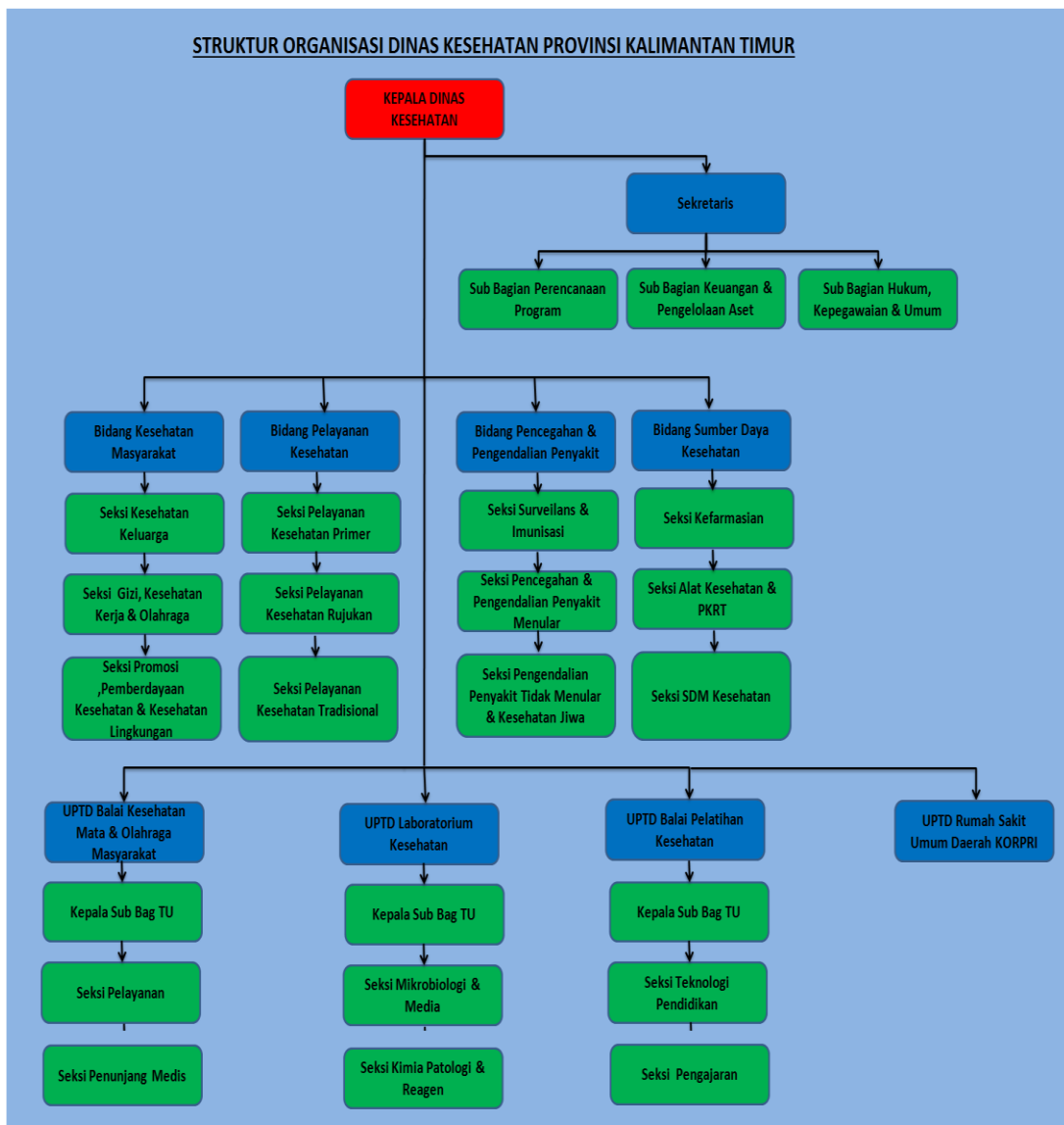
➤ **UPTD Rumah Sakit Mata**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi pemeriksaan kesehatan mata beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.1 Samarinda

➤ **UPTD Rumah Sakit Korpri**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi rumah sakit tipe D beralamat di Jl. Kesuma Bangsa no.1 B Samarinda

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD dijabarkan sebagai berikut:

➤ Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pelatihan, pengajaran dan teknologi pendidikan di bidang kesehatan serta melaksanakan urusan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan kesehatan
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan kesehatan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kesehatan
- Pengelolaan urusan ketatausahaan
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ UPTD Laboratorium Kesehatan

Tugas yang mejadi tanggungjawab UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan pelayanan dan peningkatan mutu pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat serta melaksanakan urusan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional laboratorium kesehatan
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional laboratorium kesehatan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan laboratorium kesehatan
- Pengelolaan urusan ketatausahaan
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ UPTD Rumah Sakit Mata

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan mata. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana teknis operasional kesehatan mata
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesehatan mata
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan mata
- Pengelolaan urusan ketatausahaan
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ UPTD Rumah Sakit KORPRI

Tugas yang mejadi tanggungjawan UPTD Rumah Sakit KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam urusan pelayanan kesehatan perorangan secara paripyrna. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Rumah Sakit KORPRI Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit

- Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- Pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pelayanan kesehatan.
- Penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pelayanan kesehatan.
- Pembinaan terhadap seluruh perangkat RSUD Korpri
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Kesehatan dan UPTD Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 24 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Dinas Kesehatan Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan							
	S3	S2	S1	D IV	D III	DI	SMA	SMP
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	3	1	-	-	-	-	-
Kepala Sub	-	4	3	-	-	-	-	-

Jabatan	Pendidikan							
	S3	S2	S1	D IV	D III	DI	SMA	SMP
Bidang								
Jabatan Fungsional	-	2	3	-	-	-	-	-
Staf	-	5	24	1	2	7	19	4
Jumlah	1	14	31	1	2	7	19	4

Tabel 25 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan								
	S3	S2	S1	D IV	D III	DI	SMA	SMP	SD
Kepala UPTD	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Fungsional	1	4	-	-	-	-	-	-	-
Staf	-	1	3	-	-	-	11	1	2
Jumlah	1	9	3	-	-	-	11	1	2

Tabel 26 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD Laboratorium Kesehatan Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan							
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD
Kepala UPTD	-	1	-	-	-	-	-	-
Kepala Sub	-	1	1	1	-	-	-	-

Jabatan	Pendidikan							
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD
Bidang								
Jabatan Fungsional	-	1	6	4	8	-	-	-
Staf	-	-	-	-	1	1	3	-
Jumlah	-	3	7	5	9	1	3	-

Tabel 27 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD RS Mata Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala UPTD	-	1	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	1	2	-	-	-
Jabatan Fungsional	-	1	2	1	13	-
Staf	-	-	1	-	1	5
Jumlah	-	3	5	1	14	5

Tabel 28 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil UPTD RS Korpri Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala UPTD	-	1	-	-	-	-

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Sub Bidang	-	-	-	-	-	-
Kepala Seksi	-	-	2	2	-	
Jabatan Fungsional (Staf)	-	1	2	-	2	-
Jabatan Pelaksana (staf)	-	-	2	-	1	1
Jumlah	-	2	6	2	3	1

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan danantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 1 Februari 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur ,

Dr. dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS

Pembina Tk. I
NIP. 19710720 200604 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2020
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2020 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2020
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2020 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2020
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2020 yang ditagih / dibayar tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2020 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2020 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2020 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2020 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2020 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2020 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)

Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2020
Lampiran XXVI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka / Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2020 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)